

QUO VADIS INVASI SEKUTU TERHADAP LIBYA

Setyasih Harini
Staf Pengajar Fisip Unisri

Abstract

This article explores about the reason why US and NATO attack Libya. Libya is one of the maghribi country that received an impact of democratic movement after Tunisia and Egypt. That democratic movements want Gadhaffi hold a general election to elect new government and free life from dictator government. Libya under Gadhaffi never held a general election and in fact he changed a system of government according to himself. Gadhaffi who hold his power more than 42 years against a tide of popular support for fresh voices. For US and his alliance make the reason behind the Libyan military strike is not only the traditional justification of protecting the national interest. It can called right to protect, *is an effort to create a new international moral standard to prevent violence against civilians after more than six thousand people had accidently killed*. Gadhaffi also failed to make a demokratic country. Issue about democratic country is very significant and important for Western Countries. They can do everything to rebuilt a democratic country according to they will. But it can be denied that Libya's oil reserves, as large as they are. Oil is very significant and it is the real national interest for US and its alliances.

Pendahuluan

Peperangan bukanlah jalan akhir. Invasi dan intervensi asing atas negara berdaulat perlu mendapat pemikiran ulang. Itulah yang mestinya dipikirkan kembali oleh PBB selaku organisasi internasional yang mengayomi semua bangsa berdaulat. PBB mestinya tidak harus selalu mengekor dan mengamini segala tindakan yang dilakukan oleh sekutu dengan pimpinan AS. Namun sayang sampai hari ini, AS dan NATO di bawah restu PBB masih mengibarkan sayap di bumi Khadafy. Khadafy se-

bagai penguasa revolusioner Libya secara internasional dianggap sebagai tokoh nomor satu Libya yang telah melakukan pelanggaran HAM.

Selama perjalanan pemerintahan Khadafy sejak 1 September 1969 ternyata telah menewaskan ribuan manusia dan masih ditambah dengan korban-korban orang tak berdosa yang dijebloskan ke penjara. Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an Barat menganggap Libya sebagai "negeri pariah" karena tindakan Khadafy yang melakukan terorisme, pembunuhan

tokoh oposisi, serta nepotisme demi keuntungan uang multimiliar dollar bagi keluarganya. Partai-partai politik dilarang oleh Khadafy karena dianggap sebagai bagian dari diktator.

Khadafy juga mengkritik sistem parlemen sebab badan perwakilan bukanlah suara rakyat. Untuk membangun negaranya Khadafy telah berencana mendirikan semacam kerajaan yakni Saiful Islam yang salah satu anaknya dipersiapkan sebagai penggantinya (Kompas, 28 Maret 2011). Kekejaman lain yang dimotori Khadafy terjadi pada tanggal 14 Juni 1996 di Penjara Abu Salim, satu penjara politik terkenal di Tripoli. Satu unit pasukan khusus Libya mendobrak penjara dan membantai 1.270 penghuninya hanya dalam beberapa jam. Baru-baru ini tepatnya tanggal 24 Januari 2010, pemerintah Libya memblokir situs Youtube setelah seseorang mengunggah video unjuk rasa keluarga korban pembantaian di Penjara Abu Salim.

Khadafy juga mengubah nama negerinya dari Republik Arab Libya menjadi Jamahiriya (1977). Negara "ciptaan" Khadafy ini mendasarkan pada Kitab Al-Akhdar (Buku Hijau), semacam buku suci bidang politik. Pada tahun 1969 Khadafy menghapus gelar perdana menteri menjadi "saudara pemimpin" atau "sang pembimbing" bagi Revolusi Sosialis Libya. Sebagai seorang pemimpin negara, belum pernah sekalipun Khadafy menggelar pesta demokrasi. Dalam krisis politik saat ini pun Khadafy tidak mau menyelenggarakan pemilihan umum atau referendum untuk mewujudkan keinginan rakyatnya tapi justru pantang mundur

sampai peluru penghabisan. Kekejaman demi kekejaman yang telah dirasakan oleh rakyat Libya melahirkan kekuatan kaum oposisi yang menuntut mundurnya Khadafy dari kursi pemerintahan. Kondisi riil menunjukkan bahwa usaha perlawanan yang dilakukan kaum oposisi untuk menggulingkan rezim Khadafy hingga sekarang belum berhasil.

Dalam kebijakan luar negerinya Khadafy juga mengalami pasang surut. Sebelum 2003, Khadafy dikenal sebagai sosok anti-Barat. Negara-negara Barat sering menyebut Khadafy bersama dengan Imam Khomeini (Iran), Hafiz al-Asad (Suriah), dan Saddam Hussein (Irak) sebagai para pemuka Timur Tengah "penganut garis keras" dan "anti-Barat". Selepas tahun 2003, Khadafy mengubah haluan politiknya 180 derajat menjadi "anak manis" bagi Barat. Beberapa kesempatan Khadafy telah berhasil melobi PM Inggris (waktu itu) Tony Blair. Salah satu keberhasilan Khadafy atas Blair adalah dalam penjualan minyak Libya ke Inggris, sumbangan Khadafy kepada London School of Economics (universitas terkemuka di London) serta pembebasan "pelaku" pengeboman pesawat komersial Pan Am di Lockerbie (1988), Abdelbaset Ali al-Megrahi, yang meringkuk di penjara Skotlandia.

Meskipun pembebasan ini menimbulkan amarah Gedung Putih, Khadafy juga berhasil memperbaiki hubungan dengan Italia dan Perancis. Kehebohan internasional sempat terjadi manakala Saiful Islam Khadafy (putra Khadafy) mengakui bahwa ayahnya ikut mendanai kampanye Presiden Prancis Nicolas

Sarkozy. Namun, pergolakan politik di Dunia Arab ditambah ambisi Barat untuk menguasai minyak Libya membuat skenario normalisasi Barat-Libya sirna. Di usianya yang hampir mencapai 70 tahun, Khadafy kembali berperang melawan Barat. Dengan sejumlah keanehan dan keganjilan gaya pemerintahan ala Khadafy menyebabkan rakyat menginginkan sebuah revolusi.

Revolusi total (completely organic of revolution) untuk menggulingkan satu pemerintah yang berkuasa seharusnya dilakukan sendiri tanpa intervensi asing. Revolusi itu dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun sayang sejarah mencatat hal itu belum bisa terwujud. Entah berhasil atau tidak, revolusi tidak dapat dilepaskan dari bantuan dan campur tangan pihak ketiga. Dalam revolusi Amerika umpamanya, pada saat itu armada Perancis yang merapat ke bandara Yorktown. Demikian juga dalam Revolusi Bolshevik yang dilancarkan Lenin bisa berhasil karena mendapat bantuan keuangan dari Jerman. Bahkan dalam revolusi Tiongkok, Mao Tse Tung tidak akan berhasil mendepak Chang Kai Sek ke Taiwan tanpa bantuan senjata Rusia (Walter S. Jones, 1993:218).

Dari kondisi di atas kemudian PBB selaku badan internasional yang mempunyai "kedaulatan di atas negara" berusaha untuk mengatasi dengan caranya sendiri. Langkah pertama yang diambil dengan mengeluarkan Resolusi "Zona Larangan Terbang" di atas wilayah Libya. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 tersebut sekaligus mengizinkan "segala tindakan yang diperlukan (termasuk aksi militer) guna melin-

dungi warga sipil di Libya, dari serangan dan pembunuhan pasukan Khadafy. Perlu diketahui bahwa sehari sebelum Khadafy mengumumkan menerima resolusi PBB, pasukan berlapis baja dan pesawat terbang Khadafy sempat menghancurkan pertahanan terakhir "pemberontak" di Kota Misrata hingga jatuh korban ratusan orang.

Rumusan Masalah

AS seakan mempunyai pandangan general dalam menumbangkan rezim berkuasa untuk mewujudkan suatu pemerintahan demokratis ala Barat dan penegakan HAM di wilayah Timur Tengah dan Maghribi (negeri yang memiliki garis pinggir laut panjang di sepanjang Laut Atlantik, dari Selat Gibraltar hingga Laut Tengah). Sejak tahun 2005 AS telah membuat semacam standarisasi kebijakan eksternalnya terlebih yang menyangkut masalah HAM. Seperti invasi yang telah dilakukan di Irak, Afghanistan, Tunisia, Mesir, Yaman dan sekarang Libya semuanya didasarkannya atas nama pelanggaran HAM. Padahal organisasi-organisasi yang mewadahi negara-negara Arab dan sekitarnya seperti Lembaga Kerjasama Negara-Negara Teluk (Gulf Cooperation Council), Organisasi Konferensi Islam/OKI (Islamic Conference Organization) atau Liga Arab hanya diam seribu bahasa. Dari sini kemudian muncul pertanyaan apakah kepentingan sekutu (baca: AS) dan NATO di balik invasinya ke Libya?

Teori Domino

Krisis politik yang sekarang terjadi di negara-negara kawasan Timur

Tengah dan Maghribi merupakan gambaran dari efek domino. Gelombang demokratisasi sebagai proses transformasi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi yang diawali Tunisia dan Mesir kini Libya datang secara berurutan. Negara-negara yang pemimpinnya telah lama berkuasa seperti Yaman, Bahrain, Suriah, Jordania, Aljazair, Maroko dan Oman berada pada "daftar tunggu" gerakan massa untuk menggulingkannya. Dinamika politik seperti ini dapat dikonseptualisasikan sebagai dorongan atau tuntutan terhadap perubahan rezim. Perubahan rezim (rezim change) yang diwakili dengan "parlemen jalanan" pada dasarnya memandang negara dan pemimpin yang tengah berkuasa sebagai "rezim menjijikkan" (odius rezime) (diambil dari diskusi Kompas 29 Maret 2011). Mulai dari Presiden Tunisia Zine Al-Abidine Ben Ali yang berkuasa selama 23 tahun ternyata didahului dengan usahanya mengkadeta presiden sebelumnya Habib Bourguiba. Presiden Mesir Hosni Mubarak yang berkuasa sejak 14 Oktober 1981 menduduki pemerintahan dengan membunuh Presiden Anwar Sadat. Moamar Khadafy yang terus setia dengan pangkat kolonel ternyata juga mengkadeta militer guna menyingkirkan Raja Idris.

Jika ditelaah lebih lanjut efek domino yang ditimbulkan dari gelombang demokrasi yang kini merasuki wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara ternyata didahului dari kawasan Asia Tenggara. Transisi demokrasi yang pernah terjadi pada tahun 1980-an sampai 2000-an dengan tergulingnya rezim otoriter Ferdinand Marcos di Filipina secara cepat

merambah ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Perubahan rezim tersebut dilakukan secara damai (Singapura dan Malaysia) maupun dengan pengorbanan rakyat sipil seperti di Indonesia, Thailand dan Kamboja. Ada beberapa pemikiran tentang transisi menuju demokrasi. Pertama sejak munculnya AS sebagai satu-satunya negara adidaya ada kecenderungan dalam sepak terjangnya untuk melebarkan gagasan demokrasi. Dalam pandangannya, demokrasi sebagai jalan keluar untuk melepaskan rakyat dari pemerintahan otoriter. Dengan pemerintahan demokrasi, rakyat berpeluang dapat menyuarakan aspirasi melalui pesta demokrasi (pemilihan umum secara berkala) sehingga jalan menuju kehidupan sejahtera lebih tertata. Kedua, menyebarkan demokrasi merupakan kepentingan global AS sebagai instrumen soft power untuk menancapkan hegemoni dalam dunia internasional. Ketiga, gagasan tentang demokrasi ala Barat ternyata juga dapat dikawinkan dengan ideologi Islam. Sebab tujuan utamanya adalah melindungi rakyat dengan memberikan kebebasan lepas dari pemimpin yang berkarakter otoriter dan mendominasi baik dalam bentuk monarki maupun republik. Dengan kata lain dalam pemerintahan demokrasi semuanya dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Demikianlah dalam sistem politik internasional, negara-negara yang memiliki kedekatan geografis ternyata dapat saling mempengaruhi. Segala sesuatu yang terjadi di satu negara kemungkinan besar pernah atau bahkan

masih terjadi di negara tetangganya. Teori domino seperti halnya efek domino sebagai fenomena perubahan berantai berdasarkan prinsip geo-politik dan geo-strategis lahir dari konsideran geografis. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden AS, Dwight Eisenhower, dalam Konferensi Pers-nya pada 7 April 1954 sebagai respon terhadap perebutan hegemoni antara Blok Barat dan Blok Timur mengenai perluasan komunisme dari Uni Soviet ke Indochina. Eisenhower mengkhawatirkan fenomena "falling domino" principle yang melanda negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Asia Selatan. Obyek dari teori ini adalah negara-negara yang secara geografis berdekatan terutama berasal dari kawasan yang sama. Hal ini dapat dianalogikan seperti kartu domino China (Mahyong) yang sedang berdiri tegak. Ketika keping domino paling awal dijatuhkan, ia akan menimpa keping domino terdekat, dan proses ini akan berlanjut hingga ke keping domino terakhir.

Langkah yang diambil negara-negara Barat terutama AS dengan menyuntikkan gagasan demokrasi di Libya masih terkesan terlalu gegabah dan terburu-buru. Seperti halnya sebuah kekeliruan yang pernah dilakukan di Irak yang akhirnya pembagian kekuasaannya (sebagai bagian dari sistem demokrasi) ditandai dengan berdasarkan pada sistem kabilah. Dalam dua kali pemilu, presiden Irak berasal dari kelompok Kurdi di utara sedangkan Syiah menempati posisi perdana menteri dan ketua parlemen dari Sunni. Pandangan pesimisme untuk melahirkan pemerintahan demokratis di Libya masih tinggi. Sebab,

esensi demokrasi yakni cara untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik secara damai membutuhkan kapasitas kelembagaan yang besar serta membutuhkan waktu lama. Dalam demokrasi juga mensyaratkan adanya masa jabatan bagi seorang penguasa secara berkala dan hal ini masih sulit terjadi di Libya. Secara umum pemahaman terhadap makna demokrasi secara kualitatif belum mendalam di benak pemimpin meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa efek dari globalisasi setiap orang dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan waktu dan ruang. Itu berarti bahwa siapa saja yang memimpin rakyat dan negara hendaknya sadar bahwa kekuasaan tidak lang-geng harus dibatasi oleh norma-norma yang berlaku. Namun yang dijalankan Khadafy selama memerintah justru sebaliknya. Ia begitu bersikukuh menerapkan ajaran Niccolo Machiavelli yang menyatakan bahwa penguasa hanya boleh mengenal satu tujuan, yakni mengejar, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan. Demi tujuan itu penguasa berhak menghalalkan tindakan apa saja. Lebih lanjut Machiavelli mengajarkan bahwa untuk mencapai hal tersebut, penguasa hendaknya jangan mau dihambat oleh norma-norma moral kemanusiaan (Sularto, 2003: 37). Penguasa harus berani bertindak kejam, bohong, bersedia membunuh dan tidak terikat pada janji atau ikatan utang budi.

Kedua, negara-negara Timur Tengah dan kawasan Maghribi umumnya mengalami sejarah panjang yang sarat akan konflik dan kekerasan baik konflik perbatasan, warisan kolonial

sampai pandangan kultural yang menempatkan perempuan pada "level kedua". Negara hanya mengutamakan keamanan (security state) untuk membenarkan semua tindakan pemimpin negara guna menetralisasi konflik yang ada dan semacam perdamaian meski hanya tataran permukaan. Demikian juga yang dilakukan Khadafy terhadap para oposan yang dianggap sebagai perusuh dan pengacau keamanan negara sehingga harus dihabisi. Untuk kasus Libya, Muhammad Abid Al-Jabiry dalam *Al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi* menggambarkan sistem pemerintahan Khadafy menganut sistem kabilah selain akidah dan upeti (opini Zuhairi Misrawi, Kompas 8 Maret 2011). Kekuatan politik Libya dibangun di atas pertalian kabilah yang selama ini menguasai birokrasi pemerintahan sebagaimana Yaman dan Irak. Khadafy mendapat dukungan kuat dari Kabilah Qadhadfa yang loyalis terutama di Tripoli dan Sirte, tanah kelahirannya yang sejauh ini dapat digunakan sebagai tameng untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pendukungnya besar dan solid. Untuk itulah Tripoli hingga saat ini menjadi kota yang tidak mudah ditaklukkan karena mempunyai dua kekuatan sekaligus, yaitu loyalis dan militer yang dipimpin langsung oleh putera kelima Khadafy. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Khadafy menggunakan ten-tara bayaran dari Afrika yang ditugasi menumpas kalangan oposisi.

Artinya bahwa kendaraan politik yang dipakai Khadafy untuk mencapai kursi kekuasaan bukanlah partai politik sebagaimana layaknya dalam negara

demokratis. Dengan tidak adanya partai politik dapat dipastikan bahwa suara dan kehendak rakyat tidak tersalurkan sampai ke pucuk pimpinan negara sehingga segala kebijakan nasional yang dikeluarkan pemerintah (Khadafy) tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat tapi keluarga yang kroninya. Kekuatan politik Khadafy lainnya adalah upeti atau uang. Upeti ini didapatkan dari minyak yang sekitar 85 % diekspor ke Eropa, khususnya Italia dan 15 %-nya ke Asia. Minyak telah menjadi berkah bagi rakyat Libya, karena pendapatan perkapitanya mencapai USD. 12.000 jauh di atas Mesir dan Tunisia.

Pendekatan kedua yang digunakan untuk melihat arah dari invasi negara-negara Barat terhadap Libya adalah kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional pada dasarnya menjelaskan bahwa untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka kehidupan negara akan berlangsung secara stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Kepentingan nasional (national interest) menurut Daniel S. Papp adalah bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, faktor ekonomi pada setiap

kebijakan yang diambil oleh suatu negara adalah untuk meningkatkan perekonomian bersama. Bidang inilah yang sering dinilai sebagai suatu kepentingan nasional (Daniel S. Papp, 1988: 29). Kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku suatu negara terhadap negara lain. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan ekonomi. Namun bisa juga terjadi *interplay* antara ideologi dengan kepentingan ekonomi sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan kepentingan ekonomi yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru (Sumpena Prawira Saputra, 1985:24).

Menurut Anak Agung Banyu Berwita dan Yanyan Mochmamad Yani, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut *realis* menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* atau kekuasaan. Dalam ranah hubungan internasional *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain baik secara

individual maupun kolektif. Hubungan kekuasaan atau *pengendalian* ini dapat melalui cara halus atau kasar. Antara lain adalah dengan teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*). Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Anak Agung Banyu Perwita, 2006: 35).

Pembahasan

Kaum oposan Libya yang kini sedang mencoba melakukan "revolusi total" ala Libya sebenarnya juga mempunyai maksud tunggal yakni membentuk pemerintahan baru. Entah berhasil atau tidak, gagasan membentuk pemerintahan baru yang lebih berpihak pada rakyat diartikan oleh negara-negara Barat sebagai wujud pemerintahan demokratis. Sebab Barat selama ini selalu beranggapan bahwa pemerintahan demokratislah yang pro rakyat dan dapat memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua rakyatnya. Anggapan tersebut diperkuat dengan sudah diberikannya "wewenang luhur" dari PBB untuk melindungi rakyat dan membantu oposan Libya. Jika dimungkinkan pembentukan pemerintahan baru oleh rakyatnya sendiri namun jika tidak semaksimal mungkin negara-negara Barat khususnya AS dan sekitarnya akan melakukan intervensi untuk membentuk pemerintahan baru yang dikehendaki rakyat.

Campur tangan atau intervensi dengan "komando" Barack Obama di Libya memang terlihat tidak etis dan

memalukan. Presiden Barack Obama, peraih Nobel Perdamaian justru memilih perang melawan rezim Khadafy daripada jalan damai. Obama (AS sebagai komando sekutu) dengan diikuti David Cameron (PM Inggris) dan Nicolas Sarkozy (Presiden Perancis) terkesan mengabaikan rasionalitas politik bahwa perang merupakan pilihan terakhir ketika perundingan gagal mencapai kata sepakat. Obama tidak mendekati Uni Afrika untuk mencari jalan damai malahan hanya mengutus menteri luar negerinya untuk melobi Liga Arab dan NATO dalam menggalang dukungan internasional merontokkan kekuasaan Khadafy. Kepentingan ekonomilah yang menyebabkan Obama bersama sekutunya melancarkan in-vansi ke Libya.

Sebagai salah satu penghasil minyak dunia, cadangan minyak Libya mencapai sekitar 44 miliar barel dengan produksi sekitar 1,7 juta barel per hari. Reserves to production ratio (R/P Ratio) menjadi sekitar 71. Perkiraan ini dapat diartikan bahwa cadangan minyak Libya akan habis 71 tahun lagi jika tidak dapat menemukan sumber minyak baru. Dengan harga minyak USD100 per barel, nilai kekayaan/aset minyak Libya sekitar USD4.400 miliar. Sedangkan kekayaan cadangan gas Libya sekitar 54 trillion cubic feet (tcf) dengan nilai sekitar USD500 miliar. Nilai kekayaan yang dihasilkan dari cadangan migas menjadi sekitar USD 4.900 miliar. Dengan jumlah yang sebegitu besar kandungan migasnya tentu saja akan menjadi lirik banyak negara termasuk AS. Bukan tidak mungkin ada agenda tersembunyi di balik invasi AS bersama

sekutu dan NATO terhadap Libya. Artinya in-tervensi yang selama ini telah dilakukan oleh negara-negara Barat bukan murni untuk melindungi rakyat sipil karena pelanggaran HAM. Meskipun tidak menguasai dan memiliki secara langsung namun setidaknya negara-negara yang telah melakukan invasi militer tersebut dapat mengontrol migas Libya. Salah satunya dengan mendorong terbentuknya pemerintahan di Libya yang bisa "pro dan mengekor" kepentingan negara-negara tersebut. Hal ini dilatarbelakangi dengan minimnya cadangan migas di perut bumi yang dimiliki oleh Perancis, Italia, dan Spanyol.

Seandainya AS beserta sekutu dan NATO-nya dapat menciptakan rezim baru yang mengekor dan mengamini kepentingan negara-negara tersebut dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan. Di sini berhasil diartikan sebagai keunggulannya karena telah menyingkirkan India dan China yang juga haus akan jaminan suplai jangka panjang dari Libya terutama berkaitan dengan semacam BUMN China yang telah lama berdiri di Libya dan 70 negara lainnya. Ketakutan yang muncul adalah sekitar 1,2 juta barel per hari produksi minyak Libya hilang dari pasar. Jika krisis Libya terus berlanjut, dalam jangka panjang pasar minyak dunia terancam kekurangan suplai. Kondisi yang ada saat ini harga minyak masih bertengger di atas USD 100 per barel. Sebelum krisis, pada November 2010 harga minyak masih sekitar USD80 per barel. Meskipun Arab Saudi masih sanggup mengganti serta mengisi kekurangan suplai dari Libya,

namun sampai sekarang pasar internasional masih sulit diyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari posisi Arab Saudi yang mengalami krisis politik padahal Arab Saudi merupakan negara pengeksport minyak terbesar di dunia. Kedepannya gejala politik yang telah melanda negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara akan berpengaruh besar terhadap kenaikan harga minyak dunia.

Kesimpulan

Invasi yang dilakukan AS dan sekutunya dengan bantuan NATO serta perlindungan PBB bukan hanya dilakukan sekarang saja. Setelah hancurnya Uni Soviet tahun 1991 AS menampilkan dirinya sebagai polisi dunia, dengan slogan demi HAM dan melindungi rakyat sipil yang mendapat tekanan (under pressure) dari pemerintahnya sendiri atau pihak asing. Sayangnya keikutsertaan AS dan intervensinya dalam masalah internal negara lain justru menimbulkan kesewenang-wenangan dan kepongahan. Biasanya invasi dilakukan secara semena-mena dalam bentuk unjuk kekuatan negara-negara besar terhadap negara-negara lain yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.

Motif invasi beraneka ragam misalnya demi idealisme keagamaan, kepentingan nasional, pengejaran musuh-musuh, perlindungan terhadap negara sekutu, mengambil alih daerah jajahan, serangan preemptif sebelum diserang, melindungi rute transportasi sumber daya alam, seperti air dan minyak; menengahi konflik antar dua

pihak lain, dan sebagai sanksi militer. Dari sekian banyak motif invasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat ternyata menunjukkan adanya kepentingan nasional terutama cadangan minyak dan gas Libya. Dengan kandungan minyak yang begitu besar AS dan negara-negara sekutunya berusaha untuk setidaknya mengontrol rute transportasi dan pengoperasian migas termasuk penjualannya di pasar internasional. Hal tersebut kemungkinan besar akan terwujud jika Libya berada di bawah pemerintahan yang berpihak pada negara-negara Barat.

Kepustakaan

- Jones, Walter S, 1993. *Logika Hubungan Internasional (terjem)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Papp, Daniel S, 1988. *Contemporary International Relation": A Framework for Understanding*, Second Editions, New York: MacMillan Publishing Company.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochmamad Yani, 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Saputra, Sumpena Prawira, 1985. *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Remaja Karya Offset.
- Sularto, 2003. *Niccolo Machiavelli, Penguasa Arsitek Masyarakat*, Jakarta: Kompas.
- Surat Kabar**
Kompas 8 Maret 2011
Kompas 28 Maret 2011
Kompas 29 Maret 2011